



REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)**



ANAK LAMPIRAN 4

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

SALINAN
ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
INDIKATOR SDGs: 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
PROGRAM 1: Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana										
Kegiatan 1: Penindakan Tindak Pidana Umum	1.1 Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	185.203	184.163	140.866	224.371	224,371	4.750.000	APBN	POLRI
	1.2 Kasus Pembunuhan (338 KUHP)	Kasus	1.321 (86%)	1.197 (97%)	766 (99%)	766 (99%)	766 (99%)	270,805	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM 1: Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	1.1 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	Jumlah Personel	575 giat (x 1000 org)	950 giat	1.218 giat	120.000	120.000	120.000	APBN	POLRI
	1.2 Pengamanan Konflik Sosial	Kegiatan	8	21	18	18	18	370.210	APBN	POLRI
	1.3 Pengamanan Unras Anarkis	Kegiatan	3 kali	4 kali	2 kali	2	2	199.390	APBN	POLRI
Kegiatan 2: Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	2.1 Jumlah Layanan Pembinaan Fungsi Baharkam Polri	Layanan	6.222	7.450	9.850	10,722	10.722	328.195	APBN	POLRI
	2.2 Pengaturan	Kegiatan	1.007.051	602,369	2.169.187	2.169.187	2.169.187	250.000	APBN	POLRI
	2.3 Penjagaan	Kegiatan	1.400.871	156,762	2.965.769	2.965.769	2.965.769	341.063	APBN	POLRI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.4 Pengawasan	Kegiatan	590.837 (32 Polda)	629.578 (33 Polda)	650.403 (33 Polda)	650.403 (33 Polda)	650.403 (33 Polda)	31.869	APBN	POLRI
	2.5 Patroli	Kegiatan	6.890.686	7.189.836	7.310.198	7.310.198	7.310.198	358.200	APBN	POLRI
PROGRAM 2: Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	1.1 Jumlah Penggalangan Intelijen Kelompok Bidang Keamanan Negara	Jumlah Penggalangan Kelompok	208	321	324	404	404	72,000	APBN	POLRI
	1.2 Jumlah Penggalangan Intelijen Individu Bidang Keamanan Negara	Jumlah Penggalangan Individu	280	403	362	684	684	140,000	APBN	POLRI
PROGRAM 3: Program Pemberdayaan Potensi Keamanan										
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1.299.641	1.299.641	610.000	APBN	POLRI
	1.2 Penyuluhan tentang Penanganan Konflik pada Bhabinkamtibmas	Jumlah personel	66	66	66	66	66	150.540.000	APBN	POLRI
	1.3 Jumlah Problem Solving (Pemecahan Masalah Kasus Ringan)	Kasus	111.514	120.226	128.320	128.320	128.320	488.149.200.000	APBN	POLRI
PROGRAM 4: Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	1.1 Pengamanan Gangguan Kamdagri Berintensitas Tinggi	Jumlah Personel	28.749	49.325	51.627	4.515	4.515	370.210	APBN	POLRI
	1.2 Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Personel	26.343 (78 kali)	46.919 (75 kali)	49.221 (77 kali)	49.221 (77 kali)	49.221 (77 kali)	831.625	APBN	POLRI
	1.3 Pengamanan Konflik Sosial	Jumlah Personel	2.406 org (10 kali)	2.406 org (10 kali)	2.406 org (15 kali)	2.406 org (15 kali)	2.406 org (15 kali)	370.210	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM 1: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Kegiatan 1 : Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	1.1 Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak	Survei	1	1	1	1	-	26000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2.1 Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	2	1	2	2	2470	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.2 Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Dokumen	1	1	1	1	1	600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	2.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kegiatan	2	2	2	2	2	1190	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.4 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2	2	920	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 3: Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah	3.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Provinsi	28	30	32	34	34	100000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 4: (Baru) Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	4.1 Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Baru)	Dokumen	1 (2017)	-	1	NA	NA	340	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4.2 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan	Kegiatan	2 (2017)	-	2	NA	NA	6600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	6.2 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Baru)	Kegiatan	2 (2017)	-	2	NA	NA	4212,8	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6.3 Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Baru)	K/L dan Pemda	6 (2017)	-	6	NA	NA	600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 7: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	7.1 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi bidang perlindungan hak pekerja perempuan yang ditindaklanjuti (Baru)	Dokumen	2 (2017)	-	2	NA	NA	1000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapat sosialisasi/advokasi tentang kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan (Baru)	K/L dan Pemda	10 (2017)	-	10	NA	NA	1350	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Potensi Keamanan										
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1.299.641	1.299.641	610,000	APBN	POLRI
	1.2 kegiatan Bintibmas tentang Premanisme	Jumlah Personil	20	20	20	20	20	4,475,000	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.										
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK (Matriks KL/II.M.L.047-30)										
Kegiatan 1: Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	1.1 Jumlah kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan*	Kebijakan	3	2	1	1	1	3,400	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus yang di review**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	450	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	147	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan**	Kebijakan	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak*	Dokumen	2	3	3	3	3	950	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum**	Dokumen	2	1	1	1	1	1,000	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil ABK di 6 provinsi**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	450	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	455	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.2 Jumlah profil pornografi anak**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.2 Jumlah profil perlindungan anak dalam konflik sosial**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
1.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak*	Kegiatan	5	7	6	6	6	3,150	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.3 Jumlah KIE terkait isu penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif**	Kegiatan	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus di desa model PATBM**	Kegiatan	-	-	32	NA	NA	4,000	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui radio elektronik dan media publik tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak**	Kegiatan	-	-	3	NA	NA	9,123	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak dari pornografi di 9 provinsi**	Media	-	-	5	NA	NA	3,000	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti*	Dokumen	6	6	6	6	6	2,750	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi pelaksanaan penanganan anak korban stigmatisasi dan anak korban jaringan terorisme**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.4 Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan ABK**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.4 Hasil pemantauan dan evaluasi PATBM**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	1,212	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) 1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang ditindaklanjuti**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	100	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan Anak di daerah	2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya*	Provinsi	28	30	32	34	34	100,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum yang di review**	Provinsi	-	-	8	NA	NA	1,200	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan sarana bermain bagi anak yang bisa diakses anak berkebutuhan khusus dan minoritas di daerah perbatasan**	Provinsi	-	-	4	NA	NA	1,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Stranas PKtA bagi Kabupaten/Kota**	Provinsi	-	-	10	NA	NA	2,000	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 2.1 jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak**	Provinsi	-	-	9	NA	NA	400	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3: Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	1.1 Pengawasan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA)	provinsi	10 (2017)	-	10	10	10	6000	APBN	Kementerian PP dan PA
	1.2 Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak	desa	36 (2017)	36	36	46	46	4100	APBN	Kementerian PP dan PA
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL (Matriks KL/II.M.L.023-16)										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	1.1 Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak	Lembaga	-	10000	10000	10000	10000	6.181.800	APBN**	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 3: LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1 : Peningkatan ketersediaan data kasus KTA.	1.1. Terinventarisir data kasus KTA.	Dokumen	-	9895	-	-	-	-	APBN	BARESKRIM
INDIKATOR SDGs:		16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
PROGRAM 1 : KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Kegiatan 1: (Baru) Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	1.1 Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Baru)	Dokumen	1 (2017)	-	1	NA	NA	340	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.2 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Baru)	Kegiatan	2 (2017)	-	2	NA	NA	6600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.3 Jumlah Provinsi yang melakukan pencatatan dan pendataan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai data terpilah (Baru)	provinsi	34 (2017)	-	34	NA	NA	3400	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs:		16.3.1. (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
PROGRAM 1: Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penindakan Tindak Pidana Umum	1.1 Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Penanganan TP	77.222	95.450	103.355	224.371	224.371	4.750	APBN	POLRI
	1.2 Kasus Penganiayaan Berat (353 Ayat 1 KUHP)	Kasus	14.574 (70%)	14.299 (66%)	14.283 (75%)	14.283 (75%)	14.283 (75%)	270.805	APBN	POLRI
PROGRAM 2: Program Pemberdayaan Potensi Keamanan										
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1.299.641	1.299.641	610	APBN	POLRI
	1.2 Giat Penyuluhan, dalam rangka Sambang &FGD kontra radikal	Kegiatan	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	847.403	APBN	POLRI
	1.2 Door to door system (DDS)	Kegiatan	8.218.129	50.283.521	53.338.326	53.338.326	53.338.326	488.149	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.										
PROGRAM 1: Pembinaan Hukum Nasional										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.1 Peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi. (Matriks K/L Hal. II.M.L.013-44 dan II.M.L.013-45)	Orang	3,450	8,005	3.021	3.021	3.021	209,500	APBN	Kementerian Hukum dan HAM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			2016	2017	2018	2019					
		1.2 Peningkatan jumlah kegiatan bantuan hukum nonlitigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin. (Matriks K/L Hal. II.M.L.013-44 dan II.M.L.013-45)	Kegiatan	259	1,188	628	628	628	33,500	APBN	Kementerian Hukum dan HAM
Kegiatan 2: Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dan pelaksanaan Bantuan Hukum		2.1 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	Kantor wilayah	33	33	33	33	33	3,500	APBN	Kementerian Hukum dan HAM
kegiatan 3: penyelenggaraan Pembinaan hukum di Wilayah		3.1 Pengawasan, Verifikasi dan akreditasi OBH	Kantor Wilayah	33	33	33	33	33	10,200	APBN	Kementerian Hukum dan HAM
		3.2 Pemerataan Layanan Bantuan Huku oleh OBH	Kantor Wilayah	33	33	33	33	33			Kementerian Hukum dan HAM
Kegiatan 4: Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hukum di wilayah		4.1. Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Persen	-	-	meningkat	meningkat	meningkat	1,000	APBN	Kementerian Hukum dan HAM
		4.2 Persentase pengawasan dan pembinaan bagi OBH	Persen	-	-	NA	NA	NA		APBN	Kementerian Hukum dan HAM
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.											
PROGRAM 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Matriks K/L Hal. II.M.L.005-19 dan II.M.L.005-20)											

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.1 Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	perkara	10.748	26.451	15.844	10.947	11.125	18,700	APBN	Mahkamah Agung
	1.2 Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu	perkara	29.556	84.382	60.456	31.826	32.432	75,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.3 Layanan Bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama	jam layanan	77.344	195.923	158.237	116.666	123.878	58,000	APBN	Mahkamah Agung
PROGRAM 2: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum										
Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.1 Layanan Pos Bantuan Hukum	jam layanan	12.275	1.214	373	108.675	108.675	54,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.2 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	perkara		27.229	53.246	5.458	5.458	35,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.3 Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	perkara	103.374	113.148	98.236	873	873	3,400	APBN	Mahkamah Agung
INDIKATOR SDGs: 16.3.2. (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama	1.1 Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan IT sesuai standar	UPT	11 (2017)		11	16	18	4,500	APBN	Kemenkumham (Ditjen PAS)
	1.2 Jumlah pengembangan layanan masyarakat yang berbasis IT	Layanan	44 (2017)	-	44	49	54			Kemenkumham (Ditjen PAS)
	1.3 Jumlah UPT Masyarakat yang mengisi data Masyarakat di SDP sesuai standar	UPT	489 (2017)	-	489	520	550			Kemenkumham (Ditjen PAS)
PROGRAM 2: Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	1.1 Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan layanan administrasi dan layanan tahanan sesuai standar	UPT	172	-	172	182	193	2,500	APBN	Kemenkumham (Ditjen PAS)
INDIKATOR SDGs: 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
PROGRAM 1: Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	1.1. Jumlah Kementerian/Lembaga /Organisasi/Pemerintah Daerah (KLOP) yang melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi	K/L/O/PD	10	10	10	10	10	130.000	APBN	Komisi Pemberantasan Korupsi
INDIKATOR SDGs: 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
PROGRAM 1: Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal										
Kegiatan 1: Penyusunan Rancangan APBN	1.1 Akurasi Perencanaan APBN	Persen	95	95	96	97	98	30.077,52	RM	Direktorat Penyusunan APBN
Kegiatan 2: Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	2.1 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L	Persen	15	12,5	-	-	-	8.750,28	RM	Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III
Kegiatan 3: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	3.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	6.739,89	RM	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Kegiatan 4: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	5.554,84	RM	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN	5.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	2.593,72	RM	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Instansi BPK.										
PROGRAM 1: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah										
Kegiatan 1: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.1. Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Maturitas SPIP level 3	Persen	2 (2016)	2	32	55	85	226,755	APBN	BPKP
	1.2. Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kapabilitas APIP level 3	Persen	8 (2016)	8	21	56	85	254,507	APBN	BPKP
PROGRAM 2: Pengelolaan Perbendaharaan Negara										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	1.1 Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan Opini Audit yang Baik	Indeks	3,5 (2016)	3,5	3,5	3,5	3,5	106,557	APBN	Kemenkeu
PROGRAM 3: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah										
Kegiatan 1: Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.1 Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	Provinsi/Kabupaten/Kota	20 Provinsi 250 Kab/Kota	22 Provinsi 275 Kab/Kota	24 Provinsi 300 Kab/Kota	26 Provinsi 325 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota	10.775,3	APBN	Kemendagri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	Provinsi/Kabupaten/Kota	18 Provinsi 175 Kab/Kota	21 Provinsi 200 Kab/Kota	25 Provinsi 250 Kab/Kota	27 Provinsi 280 Kab/Kota	29 Provinsi 305 Kab/Kota	10.203,2	APBN	Kemendagri	
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
PROGRAM 1: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	1.1. IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada K/L dan Pemerintah Provinsi (*termasuk komponen pelayanan asistensi/bimtek/coaching clinic implementasi SAKIP)	IP	210 (2017)	-	210	400	400	6.531,5	APBN	KemenPAN RB
	1.2. IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	IP	480 (2017)	-	480	624	624	28.136,4	APBN	KemenPAN RB
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (Instansi LKPP).										
PROGRAM 1: Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
Kegiatan 1: Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	1.1. LPSE yang Terstandarisasi (*terdiri dari komponen standarisasi layanan	LPSE	180	460	610	635	-	21.617,3	APBN	LKPP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
security dan capacity LPSE)									
1.2. Cloud Data Center LPSE (*terdiri dari komponen analisa dan desain sistem, penguatan kapasitas infrastruktur dan cloud LPSE, pengembangan dan implementasi, serta penguatan layanan LPSE)	Provinsi	18 (2016)	18	34	34	34	117.011,9	APBN	LKPP
1.3. Penyedia yang Terkualifikasi (*merupakan output dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Mangement System (VMS). VMS adalah data penyedia terpusat, yang memuat informasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data/ informasi mengenai identitas, kualifikasi,	Penyedia	67.200 (2016)	67.200	112.000	123.200	134.400	21.539,1	APBN	LKPP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Jumlah IP yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi-nya	IP	180 (2017)	-	180	262	312	16.693,1	APBN	KemenPAN RB
PROGRAM 2: Program Bina Otonomi Daerah										
Kegiatan 1: Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah	1.1 Jumlah daerah provinsi yang mendapat status berkinerja tinggi	Provinsi	28 provinsi	28 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	28.904,6	APBN	Kemendagri
	1.2 Jumlah daerah kabupaten/kota yang mendapat status berkinerja tinggi	kabupaten/kota	65 kota dan 291 kabupaten	65 kota dan 291 kabupaten	65 kota dan 291 kabupaten	91 kota dan 423 kabupaten	91 kota dan 423 kabupaten	40.345,4	APBN	Kemendagri
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik										
PROGRAM 1: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	1.1. UPP yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (*terdapat komponen pengolahan data nasional)	UPP	300 (2017)	300	300	300	300	6,817	APBN	KemenPAN RB
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
PROGRAM 1: Pengawasan Pelayanan Publik										
Kegiatan 1: Pencegahan Mal-administrasi	1.1. Survey Kepatuhan K/L/Pemda terhadap Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	survey	1 (2017)	1	1	1	1	68.900	APBN	Ombudsman RI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi									
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	UPP	300 (2017)	300	300	300	300	49.900,0	APBN	KemenPAN RB
PROGRAM 3: Bina Pembangunan Daerah									
Kegiatan 1: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	5.087,50	APBN	Kemendagri
Kegiatan 2: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	6.076,70	APBN	Kemendagri
Kegiatan 3: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	3.544,40	APBN	Kemendagri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDGs: 16.7.1. (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
PROGRAM 1 : Program Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum, Kemendagri)										
Kegiatan 1 : Daerah yang terfasilitasi Pendidikan Politik Untuk Politisi Perempuan	1.1. Daerah yang Terfasilitasi Pendidikan Politik Untuk Politisi Perempuan	Provinsi	1 laporan	1 laporan	6 layanan	6 provinsi	6 provinsi	7.094	APBN	Kementerian Dalam Negeri
PROGRAM 2 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (KPU)										
Kegiatan 1 : Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	1.1 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	Kegiatan	9	9	91	100	150	310,471	APBN	KPU
PROGRAM 3 : Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu)										
Kegiatan 1: Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	1.1 Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (Bawaslu provinsi, peserta pemilu, Panwas, dan organisasi masyarakat sipil	Daerah	34	34	34	34	34	38,560	APBN	Bawaslu
PROGRAM 1: (Matriks KL/II.M.L.059-23)										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan	1.1 Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	-	2	2	1	1	2,100	APBN	Kementerian PP dan PA
(Baru) Kegiatan 1: Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	1.1 Jumlah kebijakan yang ditelaah tentang 30% keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif**	Kebijakan	-	-	5	NA	NA	2,650	APBN	Kementerian PP dan PA
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Matriks KL/II.M.L.059-23)										
	1.1 Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas	Ormas	-	82	100	100	100	20.257,2	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs: 16.7.1. (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
PROGRAM 1: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Matriks KL/II.M.L.047-1)										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengarusutamaan gender bidang hukum	1.1 Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	1	1	1	1	1800 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	2.1 Jumlah kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1	3490 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3: Pengarusutamaan gender bidang IPTEK	3.1 Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	2	2	1	1	3380 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 4: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan	4.1 Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	4100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	5.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	4	4	2	2	3350 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 6: Pengarutamaan Gender Bidang Ekonomi	6.1 Jumlah kebijakan yang disusun untuk mendukung Industri Rumahan di tingkat Pusat	Kebijakan	1	2	1	1	1	3380	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 7: Pengarutamaan gender bidang Pendidikan	7.1 Jumlah kebijakan bidang pendidikan dan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	2250 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 8: Pengarutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	8.1 Jumlah kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	3	3	3	2	5900 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 9: Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	9.1 Jumlah kebijakan yang ditelaah tentang 30% keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Kebijakan	2	2	2	1	1	2100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 10: Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	10.1 Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	3	4	3	5060 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
INDIKATOR SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik										
PROGRAM 1 : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)										
Kegiatan 1 : Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	1.2 Indeks Demokrasi Indonesia	Skor	72.82	70.09	74.3	74.60	75	52,107,773	APBN	Kemenko Polhukam
	1.2 (i) Indeks Lembaga Demokrasi	Skor	66.87	62.05	77	78	79			
	1.2 (ii) Indeks Kebebasan Sipil	Skor	80.30	76.45	85	86	87			
	1.2 (iii) Indeks Hak-hak Politik	Skor	70.63	70.11	66	67	68			
PROGRAM 2: Program Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum, Kemendagri)										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Fasilitasi Politik Dalam Negeri	1.2 Penguatan Pokja Demokrasi (Bimbingan, Supervisi dan evaluasi kinerja pemma dalam pengembangan demokrasi (IDI))	Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	10 provinsi	15 provinsi	10.024	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs:		16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.								
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	34	28.700	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	Persen	74,27 (a)	74,5 (a)	75,41 (a)	NA	NA	22.200		Tidak ada data target kepemilikan akta khusus untuk anak umur 5 tahun ke bawah
Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Kependudukan	2.1 Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Dukumentasi Kebijakan Informasi Kependudukan	Laporan	6	6	3	3	3	16.100	APBN	Kementerian Dalam Negeri
kegiatan 3: Pengembangan Sistem Administrasi	3.1 Sarpras Siak Di 514 Kab/Kota, serta	Kab/Kota	514	514	514	514	514	1.492.600	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kependudukan (SAK) Terpadu	DC dan DRC Kependudukan									
	4.2 Terlaksananya sosialisasi di 34 provinsi tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Daerah	548 (2017)	-	548	548	548	2.900	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs:										
16.9.1. (a) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
16.9.1. (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	34	21.065.959	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	Persen	72,3	74	75	76	77,4	16.654.602		
	1.3 Tersedianya kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak yang lengkap dan harmonis	Kebijakan	1	-	-	-	-	129,3	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.4 Terlaksananya sosialisasi di 34 provinsi tentang hak anak untuk	Daerah	-	-	548	548	548	2.978.037	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	memperoleh akta kelahiran secara gratis									
Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Kependudukan	2.1 Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Dukumentasi Kebijakan Informasi Kependudukan	Laporan	6	6	3	3	3	16.125.267	APBN	Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan 3: Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	3.1 Sarpras Siak Di 514 Kab/Kota, serta DC dan DRC Kependudukan	Kab/Kota	514	514	514	514	514	372.591.186	APBN	Kementerian Dalam Negeri
PROGRAM 1: Perluasan Pelayanan Dasar										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Dasar	1.1 Terwujudnya kepemilikan akta kelahiran pada 40% penduduk miskin (anak usia 0-17 tahun)	Persen	71,59	74,06 (a)	76,46 (a)	76	77,40	22.200	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (Usia 0-17 tahun)	Persen	79,92	81,68 (a)	83,33 (a)	82	85			
INDIKATOR SDGs: 16.10.1. (a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
PROGRAM 1: Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyelesaian Pelanggaran HAM	1.1 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Paniai	kasus	-	-	-	3	3	3,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.2 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	penyelidikan	3 (2015)	3	4	4	4	7,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.3 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	kasus	400 (2015)	3850	1024	600	610	27,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.4 Pengaduan yang dikelola oleh Komnas HAM	pengaduan	-	7500	7500	7500	7500	6,700	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.5 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi	kasus	48 (2016)	48	102	77	85	8,800	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
PROGRAM 2: Program Pemajuan HAM. (Matriks Hal. II.M.L.013-40)										
Kegiatan 1: Program Pemajuan HAM.	1.1 Prosentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	Persen	50	50	50	50	50	4,400	APBN	Kemenkumham (Ditjen HAM)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Pelayanan Komunikasi Masyarakat	2.2 Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM	Kasus	180 (2017)	-	180	180	180			Kemenkumham (Ditjen HAM)
PROGRAM 3: Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.										
Kegiatan 1: Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Matriks KL Hal. II.M.L.006-22)	1.1 Jumlah penanganan perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat, dan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara	-	-	-	2	2	200	APBN	Kejaksaan Republik Indonesia
INDIKATOR SDGs: 16.10.1. (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEKAKAN HAM (Matriks KL Hal. II.M.L.074-7)										
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah laporan pemantauan yang dihasilkan dalam 12 bulan terakhir	Laporan	1	1	1	1	1	2,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 12 bulan terakhir	Pengaduan	10	10	10	10	10	1,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.3 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau	Pengguna	10	10	10	10	10	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	pengetahuan mengenai KtP									
PROGRAM 2: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Pengembangan Konsep penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Konsep	1	1	2	2	2	2,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/keompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Inisiatif	1	1	3	3	3	1,000	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.										
PROGRAM 1 : Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik										
Kegiatan 1 : Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	1.1 Prosentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan	Persen	47	50,38	70	75	80	2,250	APBN (KOMINFO)	KOMIS INFORMASI PUSAT (KIP)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Keterbukaan Informasi Publik									
Kegiatan 2: Diseminasi UU KIP kepada Badan Publik	2.1 Jumlah Badan Publik yang menerima informasi tentang ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	N/A	189	80	80	100	1,000	APBN (KOMINFO)	KIP
PROGRAM 2 : Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik										
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	1.1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP melalui kegiatan seminar/forum	Orang	2000	3500	2000	2000	2000	15,000	APBN	Ditjen IKP Kemkominfo
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
PROGRAM 1 : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik										
Kegiatan 1 : Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Informasi Publik	1.1 Prosentase terselesaikannya kasus/ sengketa teregister ditahun berjalan	Persen	56,63	54,02	65	65	65	2,750	APBN (KOMINFO)	KIP
Kegiatan 2: Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	2.1 Penerima Bimtek Perki tentang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan	Orang	30	0	40	40	50	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
	2.2 Penerima Bimtek Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Orang	41 (2016)	41	40	40	50	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP
Kegiatan 3 : Penyusunan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi	3.1 Tersusunnya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Dokumen	5 (2016)	5	1	2	2	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP
Kegiatan 4 : Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4.1 Terselenggaranya diskusi ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kegiatan	2 (2016)	2	2	2	2	1,000	APBN (KOMINFO)	KIP
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
PROGRAM 1 : Penguatan Layanan Informasi PPID										
Kegiatan 1 : Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kualitas PPID	1.1 Jumlah Badan Publik yang menerima Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kualitas PPID	Badan Publik	40 (2017)	N/A	40	40	50	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP
Kegiatan 2: Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik se-Indonesia	2.1 Jumlah Badan Publik yang menerima Bimtek tentang Sistem layanan Informasi PPID	Badan Publik	40 (2017)	N/A	40	40	50	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP
PROGRAM 2 : Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	1.1 Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP di Badan Publik Negara melalui Bimtek	Orang	250	209	307	250	250	10,000	APBN	Ditjen IKP Kemkominfo
INDIKATOR SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.										
PROGRAM 1: Mempertahankan Akreditasi A Paris Principles Komisi Nasional Hak Asasi Manusia										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	1.1. Terpilihnya Komisioner Komnas HAM yang independen	Orang	7 (2017)	-	7	-	-	1,100	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	2.1. Implementasi Jejaring Komnas HAM melalui Forum Lembaga HAM Nasional (K/L/I/D)	Kegiatan	6 (2017)	-	6	Meningkat	Meningkat	2,170	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 3: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	3.1 Implementasi Jejaring Komnas HAM melalui SEANF, ICC, APF, Regional Consultative Meeting, International Conference dan UN Session	Kegiatan		-	7	Meningkat	Meningkat	3,390	APBN	Komnas HAM
kegiatan 4: Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	4.1 Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan	Instansi	40% (2017)	-	40%	-	meningkat	4,352	APBN	Komnas HAM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pemenuhan hak kelompok minoritas									
	4.3 TOT terkait HAM kepada aparatur dan masyarakat	Orang	51 orang (2015)	- (level komponen, tidak ada target)	- (level komponen, tidak ada target)	tidak dianggarkan secara khusus	tidak dianggarkan secara khusus	1,653	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 5: Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5.1 Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang perspektif HAM dan isu lain terkait HAM	Persen	14 (2015)	5	15	16	meningkat	8,702	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 6: Akuntabilitas NHRI kepada Publik	6.1 Penyusunan Laporan Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	650	APBN	Komnas HAM
	6.2 Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	290	APBN	Komnas HAM
PROGRAM 2: Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP										
Kegiatan 1: Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP	1.1 Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP	Dokumen	1	1	1	1	1	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
1.2. 7. Peningkatan layanan Komnas Perempuan sebagai women human rights resource centre	Layanan	12	12	12	12	12	1,000	APBN	Komnas Perempuan	
INDIKATOR SDGs: 16.b.1. Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional										
PROGRAM 1: Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM										
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai KtP	Pengguna	10 (2015)	10	10	10	10	500	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 jumlah pengguna layanan usia 18-24 tahun yang mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan	Orang	10 (2015)	10	10	10	10	500	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 16.b.1. (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional										
PROGRAM 1: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Rekomendasi	2	2	2	2	2	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
INDIKATOR SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
PROGRAM 3:											
Kegiatan 1: Pelatihan Literasi Digital	1.1 Output: Para santri memiliki pemahaman bagaimana cara kerja media digital dan bagaimana memanfaatkan untuk dakwah cinta tanah air	Kegiatan	1	2	2	7	7	720	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	19 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
Kegiatan 2: Pelatihan Islam dan Gerakan Cinta Tanah Air	2.1 Output: Makin kuat cinta tanah air di kalangan pesantren.	Kegiatan	0	0	1	5	7	455	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	13 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
INDIKATOR SDGs: 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
PROGRAM 2: Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis ormas dan pondok pesantren											
Kegiatan 1: Pengembangan Media ormas dan pondok pesantren: Memfasilitasi pengembangan TV MUI, mimbar Ulama	1.1. Jumlah mimbar ulama MUI yang terbit dan memuat penyuluhan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis ormas dan pondok pesantren	eksemplar		1.000	2.000	3.000	3.000	1.200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (I - Tersedia)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
MUI, media sosial, dll untuk sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis ormas dan pondok pesantren	kegiatan		10	20	30	40	swadaya	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	MUI	
PROGRAM 5: Penguatan Konten Media Sosial untuk Perlindungan Kekerasaan											
Kegiatan 1 Pelatihan Pengarusutamaan Konten Damai untuk Keamanan.	1.1. sejumlah kader dilatih	Orang	100 (2016)	100	200	300	400	500	Donor Agensi, swadaya	Nasional	Lakpesdam NU
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
PROGRAM 1: Communities attitude and practices to protect children											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk orang tua / pengasuh untuk menunjukkan	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah orang tua / pengasuh yang menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan positif	Orang tua/ Pengasuh	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	722	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
pola asuh yang positif	Orang tua/ Pengasuh	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat untuk dilengkapi perlindungan anak	Tindakan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	144	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	Orang	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	Anggota Masyarakat	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk anak-anak diperlengkapi untuk mengambil tindakan terhadap isu perlindungan anak	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah inisiatif yang dipimpin anak untuk memperkuat kecakapan hidup & perlindungan anak	Inisiatif	TBD	TBD	TBD	TBD	2.262	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.2 Indikator Kegiatan : Jumlah anak atau remaja yang telah menyelesaikan kurikulum kecakapan hidup dalam 6 bulan atau lebih	Anak	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.3 Jumlah anak, remaja dan pemuda yang berpartisipasi secara bermakna dalam tindakan yang mendukung mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak	Anak	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 4 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk pemimpin masyarakat	4.1 Indikator Kegiatan : Jumlah Congregational Hope Action Team (CHATs) -Kongresi Tim Aksi Harapan yang melaksanakan rencana aksi (dengan kurikulum Channel	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	760	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
(pemimpin Iman, pemimpin adat) diperlengkapi untuk mengambil tindakan terhadap perlindungan anak	of Hope (CoH)/Saluran Harapan, area kompetensi)										
	4.2 Indikator Kegiatan : Jumlah relawan aktif karena Congregational Hope Action Team /CHATs (oleh tipe relawan)	Orang	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 2: Perlindungan Hukum terhadap anak di lingkungan ormas dan lembaga keislaman											
Kegiatan 1: Simposium Perlindungan Hukum terhadap Anak	1.1 Jumlah ormas dan Lembaga Keislaman yang ada di Indonesia	Orang	200 (2016)			200	200	200	Kemenkumham dan Polri (I - Tersedia)	Nasional	MUI
Kegiatan 2: Lokakarya Hukum anti kekerasan terhadap anak	2.1 Jumlah ormas dan Lembaga Keislaman yang ada di Indonesia	Orang	200 (2016)			200	200	200	Kemenkumham dan Polri (I - Tersedia)	Nasional	MUI
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.											
PROGRAM 1: Penguatan Ketahanan Keluarga Dengan Perspektif Keadilan & Kesetaraan											
Kegiatan 2: Kampanye dan Pendidikan Publik tentang Pengasuhan Anak Tanpa Kekerasan	2.1. Jumlah social media campaign tentang Relasi Suami-Istri yang Sehat dan Berperspektif	jumlah kampanye social media				4	8		belum	pusat	NU - Lembaga Kemaslahatan Keluarga

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Keadilan & Kesetaraan										
PROGRAM 2: Pengarusutamaan Anak dalam Advokasi NU											
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan perlindungan anak berbasis kabupaten/kota	1.1 Sejumlah kebijakan daerah terbit	kabupaten/kota	2	5	8	10	15	1,311	donor agensi, swadaya	Cimahi, Tasik, Indramayu, Jepara, Silacap, samipt, aceh, bima, makasar, bulkuba	Lakepesdam NU
Kegiatan 2: Pembentukan satgas berbasis masyarakat	2.1 sejumlah satgas berbasis masyarakat	masyarakat	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD				
PROGRAM 3:											
Kegiatan 1: Pelatihan Pesantren Ramah Anak	1.1 Output: Pesantren memiliki pengetahuan dan ketrampilan bagaimana menyelenggarakan lembaga pesantren yang menjamin hak-hak anak	Kegiatan	0	1	1	5	5	660	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	12 propinsi	PP RMI NUBersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
PROGRAM 4: Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	3.1 Tersosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	Kegiatan Nasional dan provinsi	-	3	1 nasional, 10 provinsi	1 nasional, 14 provinsi	1 nasional, 10 provinsi	0	PGRI bekerja sama dengan instansi/ organisasi terkait (III-belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus Besar PGRI dan 34 Pengurus PGRI Provinsi
Kegiatan 4: Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.1 Terjalannya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kegiatan	-	3	3	3	3	0	Pengurus PGRI dengan instansi terkait (III-belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus PGRI dengan instansi terkait
PROGRAM 5: Child and social protection services											
Kegiatan 1: Pembentukan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah desa / kelurahan yang menerapkan sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan (laporan, rujuk dan	Desa	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	1.311	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
tindak lanjuti isu perlindungan anak										
1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah pemangku kepentingan yang mengerti CPMS-Child Protection Minimum Standard (standar minimum perlindungan anak)	Pemangku Kepentingan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
1.3 Indikator Kegiatan : Proporsi komite Perlindungan Anak yang memenuhi standar minimum	Komite	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Pembentukan mekanisme Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kasus pelecehan anak yang dilaporkan yang dirujuk ke institusi / struktur yang relevan	Laporan	TBD	TBD	TBD	TBD	1.603	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
	2.2 Indikator Kegiatan : Jumlah pemangku kepentingan yang mampu menyediakan dukungan psikososial untuk anak-anak dan masyarakat	Pemangku Kepentingan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 3: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat untuk diperlengkapi untuk mengambil tindakan untuk layanan perlindungan sosial	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok yang memimpin pengawasan terhadap perlindungan anak	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	1.960	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.2 Indikator Kegiatan : Jumlah inisiatif advokasi untuk layanan perlindungan sosial yang lebih baik yang dipimpin oleh kelompok rentan atau individu	Inisiatif	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 6: Pro child policy/regulation implemented at local and national level										
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok masyarakat yang bisa menyampaikan suaranya dalam upaya advokasi	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	1.717	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
(termasuk anak-anak) untuk dilengkapi dalam proses pengembangan kebijakan / regulasi	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok anak memberikan suaranya dalam upaya advokasi	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk koalisi masyarakat sipil (termasuk media) di tingkat kabupaten dan nasional untuk mengadvokasi kebijakan berpihak pada anak	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah tindakan kolaboratif merencanakan kebijakan berpihak pada anak yang dikembangkan dalam koalisi di tingkat kabupaten dan nasional	Rencana	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	563	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk masyarakat (termasuk anak-anak) diperlengkapi untuk memantau pelaksanaan kebijakan berpihak pada anak	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah tindakan untuk memantau penerapan kebijakan oleh kelompok masyarakat dan anak-anak	Tindakan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	2.427	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 7 :Penguatan Dukungan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Anak untuk Menegakkan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Resiko Migran, Exploitasi dan Perdagangan Anak											
Kegiatan 1: (prevention) Memperkuat komunitas, Anak, OMS dalam pencegahan melalui pendidikan komunitas, peer watch,	1.1 1870 anak terlibat di dalam usaha penyadaran terhadap bahaya perdagangan anak dan mengetahui kerentanan anak yang bermigrasi	Anak	-	1870	-	-	-	5,274	TDH NL	kepulauan riau dan kalimantan, Kota Semarang, Kubu Raya-Pontianak, Kendal-Jawa tengah, Sungai Bunru-Karawang,	indonesia ACT
	1.2 Inisiasi dan penguatan 20 forum anak di tingkat desa/kelurahan	forum	-	20	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
kampanye, publikasi	1.3 penguatan Jaringan perlindungan anak di 27 desa/kelurahan	desa/kelurahan	-	27	-	-	-		Bantul dan Gunung Kidul Yogja, Jakarta Utara, Surabaya, Mataram, Kupang, Indramayu		
	1.4 forum anak yang menjadi fokus di dalam program memberikan masukan terkait dengan program-program jaringan perlindungan anak	-	-	-	-	-	-				
INDIKATOR SDGs: 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
PROGRAM 1: Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan											
Kegiatan 1: Sekolah perempuan berbasis masyarakat	1.1 Sejumlah sekolah perempuan	Sekolah	5 (2016)	5	10	13	20	2,000	donor agensi, swadaya	jember, tasik, cilacap, cimahi, matram, sampit, aceh	lakpesdam NU
PROGRAM 2: Down to Zero											
Kegiatan 19: Baseline on functioning and effectiveness on CBCPM	19.1 Dokumen Rekomendasi CBCPM					1			Plan International	JAKARTA & NTB	Yayasan Plan International Indonesia
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											
PROGRAM 1: Adanya pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi PEREMPUAN korban & pejuang terkait kekerasan dan diskriminasi											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumberdaya bagi lembaga pengada layanan / women crisis center untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.1 Organisasi lembaga pengada layanan / women crisis center yang memperoleh dukungan sumber daya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Catur Daya (Dana, Pengetahuan, Jaringan & Kerelawanan)	2016	6 lembaga (@Rp.20jt)	6 lembaga (@Rp.20jt)	5 lembaga (@Rp.20jt-50jt)	5 lembaga (@Rp.20jt-50jt)	Rp. 20.000.000 s/d Rp. 250.000.000,-	Donasi Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/ Kota/Desa	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
PROGRAM: 2											
Kegiatan 1: advokasi rencana akasi daerah untuk pelayanan terpadu	1.1 Dokumen RAD untuk untuk pelayanan terpadu	Dokumen RAD	0 (2016)	0	1	4	13	2,000		13 kabupaten kota	lakpesdam NU
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. (Matriks K/L Hal. II.M.L.013-44 dan II.M.L.013-45)											
PROGRAM 1: Advokasi Kelompok yang mengalami eklusi sosial											
Kegiatan 1: peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami eklusi sosial.	1.1 Indikator. Sejumlah kelompok yang tereklusi mendapatkan latihan. Sejumlah layanan didapatkan oleh kelompok yang		1000	2000	7000	10.000	20000	5,000	donor agensi, swadaya	Nasional	lakpesdam NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
	mengalami eklusi sosial										
PROGRAM 2: Advokasi TKI											
Kegiatan 2: Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena masalah/kasus	2.1 Jumlah kasus yang ditangani	kasus		20	20	20	80	donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia & negara penempatan	LAZISMU, MIGRANT CARE, UNIMIG	
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.											
PROGRAM 1: Menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua											
Kegiatan 1: Pelatihan Advokat untuk perkara Ekonomi Syariah	1.1 Jumlah Advokat yang memahami ekonomi syariah	Orang/2 hari	200 (2017)		200	100	100	1.500.000/orang	Kemenkumham (I - Tersedia)	Nasional	MUI
Kegiatan 2: Pelatihan Notaris untuk pembuatan akta syariah	2.1 Jumlah Notaris untuk pembuatan akta syariah	Orang/2 hari	200 (2017)		200	100	100	1.500.000/orang	Kemenkumham (I - Tersedia)	Nasional	MUI
INDIKATOR SDGs: 16.4.1 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$). (Indikator Global yang Akan Dikembangkan)											
PROGRAM 1: Admisibilitas Penanganan Barang Bukti Elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KEMITRAAN)											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penyusunan Rancangan UU Tentang Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik	1.1 Rancangan undang-undang dan naskah akademis tentang penanganan barang bukti elektronik.	Dokumen			1			761.850.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 2: Penyusunan Peraturan pelaksana dan SOP Penanganan dan Pengelolaan BBE	2.1 Peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh MA dan Kominfo mengadopsi standar penanganan dan pengelolaan BBE	Dokumen					1	697.150.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
	2.2 SOP KPK dalam penanganan dan pengelolaan BBE sudah mengadopsi standar internasional penanganan BBE	Dokumen					1		(I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 3: Menyusun formulasi konsep dan panduan laboratorium digital forensik yang disesuaikan dengan	3.1 Adanya rancangan konsep dan panduan lab digital forensik yang menyesuaikan dengan standar internasional.	Dokumen /laporan			1			279.750.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
standard internasional											
Kegiatan 4: Peningkatan kapasitas Aparat penegak hukum dalam penanganan dan pengelolaan Barang Bukti Elektronik	4.1 Kurikulum Pelatihan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik 4.2 Jumlah aparat penegak hukum yang mendapat pelatihan penanganan dan pengelolaan Bukti Elektronik	Kurikulum dan jumlah orang			40		774.050.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	
PROGRAM 2: Perbaikan Efektifitas Penanganan Pemulihan Aset Lintas Negara Menejemen Bantuan Hukum Timbal Balik Oleh Kejaksaan RI dan Institusi yang Relevan (SIGAP)											
Kegiatan 1 : Penguatan Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung RI	1.1 Dokumen Rencana aksi Penguatan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI	Dokumen			1		1.798.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Pengembangan Protokol Kordinasi diantara Institusi Terkait dalam hal pemulihan aset lintas negara dan Bantuan Hukum Timbal Balik	2.1 Protokol Kordinasi Pemulihan Aset dan bantuan hukum timbal balik antar-institusi	Dokumen /MoU/ SKB/laporan Pilot project			1		1.677.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	
Kegiatan 3 : Pelatihan Pemulihan Aset dan Bantuan Hukum Timbal Balik bagi para pelatih di institusi penegak hukum dan lembaga terkait	3.1 Kurikulum dan Modul Training of Trainers Pemulihan Aset dan bantuan hukum timbal balik	Dokumen /Modul			1		641.595.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	
INDIKATOR SDGs: 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
PROGRAM 1: Talkshow Online dengan KPK											
Kegiatan 1:	1.1 Melakukan Talkshow Online dengan KPK	Pemirsa			1100	1200		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
1.2 Menyebarkan Kontek-Konten Anti-Korupsi bersama KPK	Pemirsa				1100	1200		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara	
PROGRAM 2: BANGGABERHENTIKORUPSI											
Kegiatan 1:	1.1 Campaign Online Berhenti Korupsi	Pemirsa			1100	1200		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara	
	1.2 Vlog bagi anak muda yang bangga tidak berhenti korupsi	Pemirsa			1100	1200		(III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara	
PROGRAM 3: KETAHANAN KELUARGA											
Kegiatan 1: Meningkatkan Pengetahuan bagi Anggota DWP	1.1 Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)	Kegiatan	1 (2016)	1	-	-	-	PM	KPK	nasional	DWP Pusat
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). (Matriks KL Hal. II.M.L.048-2)											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1: Pelatihan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	1.1 Output: Pesantren memiliki ketrampilan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.	Kegiatan	0	3	1	5	5	770	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	14 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). (Matriks KL Hal II.M.L.110-1)											
PROGRAM 1: Sosialisasi Program-Program Unggul Pemerintah terhadap Layanan Publik											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1:	1.2 Talkshow dan Sosialisasi Online Program-Program mereka	Pemirsa			1000	1000		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara	
INDIKATOR SDGs:											
16.7.2. (a) Indeks Lembaga Demokrasi.											
16.7.2. (b) Indeks Kebebasan Sipil.											
16.7.2. (c) Indeks Hak-hak Politik.											
PROGRAM 1: INSPIRE											
Kegiatan 1: Membangun dan Memfasilitasi Forum Dialog antar politisi muda lintas partai di DPR RI untuk membahas isu dan agenda nasional melawan ekstrimisme	1.1 Adanya rekomendasi/usulan kebijakan melawan ekstrimisme dari proses dialog reguler Forum INSPIRASI politisi muda lintas partai DPR RI	Rekomen dasi			4		230.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	
Kegiatan 2 : Membangun dan Memfasilitasi Ruang Dialog antara Politisi lintas partai dengan masyarakat	2.1 Adanya masukan kebijakan melawan ekstrimisme yang diterima melalui dialog reguler antara politisi lintas partai dan masyarakat sipil dan konstituen	Rekomen dasi			6		141.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
sipil dan konstituen										
Kegiatan 5: Melakukan riset pendalaman atas isu yang disepakati untuk dibahas di dalam Forum Dialog lintas partai terkait upaya melawan ekstrimisme	5.1 Jumlah riset yang dilakukan terkait isu-isu yang berkaitan dengan ekstrimisme	Laporan			6		141.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
PROGRAM 2: penyusunan Indeks Inklusi										
1.1 Riset kabupaten inklusi	1. Adanya dokumen riset	Rekomen dasi	3	3			1,000		Jakarta	lakpesdam
INDIKATOR SDGs: 16.10.1. (a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
PROGRAM 1:										

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengumpulan data tentang pengurus SB yang terintimidasi karena berserikat					10	15		(III - Belum tersedia sumber)	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Batam, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Maluku,	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
									Papua Barat dan NTT		
INDIKATOR SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1 : Memberikan dukungan sumber daya bagi setiap inisiatif untuk pemenuhan Hak EKOSOB Korban Pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Organisasi korban/lembaga pendamping korban memperoleh dukungan sumber daya untuk membantu korban pelanggaran HAM masa lalu mendapatkan akses dan layanan sosial (Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dll)	Catur Daya (Dana, Pengetahuan, Jaringan & Kerelawanan)	2016	6 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	6 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & Dinasi Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
1.2 Komunitas korban yang memperoleh akses layanan sosial (kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dll)	Jumlah korban pelanggaran HAM masa lalu yang mengakses layanan sosial	2016	100-200 orang/w ilayah kerja	100-200 orang/w ilayah kerja	100-200 orang/w ilayah kerja	100-200 orang/w ilayah kerja	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & DOnasi Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)	
Kegiatan 2: Memberikan dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu	2.1 Organisasi korban/lembaga pendamping korban memperoleh dukungan sumber daya untuk melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu	Catur Daya (Dana, Pengetahuan, Jaringan & Kerelawanan)	2016	6 lembaga (@Rp.20 jt)	6 lembaga (@Rp.20jt)	5 lembaga (@Rp.20jt-50jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt-50jt)	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & Dinasi Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
INDIKATOR SDGs: 16.b.1. (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
PROGRAM 1: Adanya pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi korban & pejuang terkait pelanggaran HAM											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	2016	-	1 kebijakan/wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & Dinas Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
PROGRAM 2: Penegakan Hukum dalam Peningkatan Toleransi dan tangkal Radikalisme											
Kegiatan 1: Sarasehan Penegakan Hukum dan HAM dalam kehidupan beragama	1.1 Jumlah tokoh masyarakat lintas Agama	orang	200 (2016)			250	250	250	Polisi dan Kemenag (I - Tersedia)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 3: INDIKATOR TPB/SDGs YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Belum semua indikator TBP/SDGs Indonesia sudah dirumuskan metadatanya karena masih menunggu kesepakatan global tentang indikator tersebut (sebagian besar adalah indikator SDGs Tier III) atau karena pada saat perumusan indikator, Tim belum berhasil merumuskan metadatanya. Dalam buku “Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia”, indikator tersebut termasuk kategori “indikator yang akan dikembangkan”. Secara bertahap indikator dengan kategori akan dikembangkan tersebut akan dirumuskan metadatanya melalui proses pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan dunia usaha, pakar dan akademisi) dibantu oleh Organisasi PBB yang mengampu indikator tersebut. Meski masih dalam kategori “indikator yang akan dikembangkan”, sudah terdapat program atau kegiatan yang diindikasikan terkait dengan beberapa indikator tersebut, baik dikerjakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Seperti halnya perumusan metadata tahap pertama, perumusan metadata tahap kedua akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi baik offline maupun online untuk disepakati bersama. Berikut adalah daftar indikator yang akan dikembangkan untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola:

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.

Kode Indikator	Nama Indikator
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.

Kode Indikator	Nama Indikator
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



